

Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah di Provinsi Kalimantan Utara

**Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Provinsi dan Kab/Kota
TA. 2014-2016**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku dengan judul “Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Provinsi Kalimantan Utara” ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kajian berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi dan Kab/Kota dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN)-Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer pusat ke daerah; kemandirian keuangan daerah; dan permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer pusat ke daerah di Pemerintahan Provinsi, 4 (empat) Pemerintahan Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintahan Kota.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku kajian ini.

Jakarta, Maret 2018

DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Provinsi Kalimantan Utara	
Infografis.....	1
A Opini.....	2
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016.....	2
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	4
D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	5
Kabupaten Bulungan	
Infografis.....	7
A Opini.....	8
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016.....	9
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	11
D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	12
Kabupaten Malinau	
Infografis.....	14
A Opini.....	15
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016.....	15
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	17
D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	18
Kabupaten Nunukan	
Infografis.....	20
A Opini.....	21
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016.....	21
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	23
D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	25
Kabupaten Tana Tidung	
Infografis.....	27
A Opini.....	28
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016.....	30
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	31
D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	32

Kota Tarakan

Infografis.....	34
A Opini.....	36
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016.....	36
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	38
D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Provinsi Kalimantan Utara.....	5
Tabel 2	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kabupaten Bulungan.....	11
Tabel 3	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kabupaten Malinau.....	19
Tabel 4	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kabupaten Nunukan.....	25
Tabel 5	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kabupaten Tana Tidung.....	33
Tabel 6	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kota Tarakan.....	40

Provinsi Kalimantan Utara

OPINI

WTP
2014

WTP
2015

WTP
2016

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(Dalam Miliar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Ketergantungan (%)
2014	0,91%	86,00%
2015	36,90%	93,34%
2016	34,82%	43,56%

Celah Ketergantungan



Temuan



Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan



Sumber: LHP atas LKPD Provinsi Kalimantan Utara TA 2014-2016

A. Opini

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada TA 2014-2016 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut. Hal tersebut menandakan bahwa Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mengalami fluktuasi dari TA 2014-2016.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi PAD pada TA 2014 adalah sebesar Rp11.833.885.267,48. Kemudian pada TA 2015 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp358.213.728.491,84 atau naik 3027,02% menjadi Rp370.047.613.759,32 dan pada TA 2016 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp137.907.903.212,81 atau naik sebesar 37,27% dibandingkan dengan TA sebelumnya menjadi Rp507.955.516.972,13.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Berdasarkan LRA untuk realisasi DBH Pajak pada TA 2014 adalah sebesar Rp104.848.110.184,00, namun pada TA 2015 realisasi DBH Pajak mengalami penurunan sebesar Rp18.267.621.255,00 atau 17,42% menjadi Rp86.580.488.929,00 dan pada TA 2016 kembali mengalami penurunan sebesar Rp32.667.243.606,00 atau 37,73% dibandingkan dengan TA sebelumnya menjadi Rp53.913.245.323,00. Selain itu untuk realisasi DBH Bukan Pajak/DBH SDA Provinsi Kalimantan Utara pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.094.988.346.662,00, namun pada TA 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar Rp982.324.738.512,00 atau 89,71% dibandingkan realisasi TA sebelumnya menjadi Rp112.663.608.150,00 dan pada TA 2016

mengalami kenaikan sebesar Rp2.907.047.254,00 atau naik 2,58% menjadi Rp207.982.439.560,00.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan LRA untuk realisasi DAU terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada TA 2014 adalah sebesar Rp20.567.986.000,00. Kemudian pada TA 2015 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu sebesar Rp630.679.442.000,00 atau naik 3066,32% menjadi Rp1.094.988.346.662,00 dan pada TA 2016 realisasi DAU Provinsi Kalimantan Utara kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp381.211.731.000,00 atau naik 58,54% lebih besar dibandingkan dengan realisasi TA sebelumnya yaitu menjadi Rp1.032.459.159.000,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan LRA untuk realisasi DAK pada TA 2014 adalah sebesar Rp8.221.270.000,00. Kemudian pada TA 2015 realisasi DAK Provinsi Kalimantan utara mengalami kenaikan sebesar Rp51.726.550.000,00 atau naik 629,18% menjadi Rp59.947.820.000,00 dan pada TA 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp189.950.454.058,00 atau meningkat 316,86% dibandingkan dengan TA sebelumnya menjadi Rp249.898.274.058,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Berdasarkan LRA untuk realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2014 adalah sebesar Rp72.893.280.000,00, kemudian pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp19.438.150.000,00 atau naik 26,67% menjadi Rp92.331.430.000,00 namun pada TA 2016 realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar Rp85.221.840.000,00 atau 92,30% dibandingkan dengan TA sebelumnya menjadi Rp7.109.590.000,00.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan LRA untuk realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2014 adalah sebesar Rp200.000.000,00, namun pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp128.435.728.000,00 atau 64,22% menjadi Rp92.331.430.000,00 dan pada TA 2016 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar

Rp1.310.730.828.378,93 atau naik 1831,54% menjadi Rp1.382.295.100.378,93.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian dapat dilihat melalui perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada TA 2014 rasio kemandirian Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 0,91%, kemudian mengalami kenaikan pada TA 2015 menjadi sebesar 36,90% dan pada TA 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 34,82%.

Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagian besar masih bersumber dari Dana Transfer Pusat ke daerah yaitu Dana Perimbangan (DBH Pajak, DBH bukan Pajak, DAU, DAK) dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase tingkat ketergantungan keuangannya yang dihitung melalui perbandingan penerimaan Dana Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan daerah. Pada TA 2014 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 86,00%, kemudian terjadi kenaikan pada TA 2015 menjadi sebesar 93,34% dan pada TA 2016 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu menjadi sebesar 43,56%.

Kemudian dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dengan rasio ketergantungan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai negatif yang cukup lebar antara selisih kedua rasio tersebut yaitu pada TA 2014 sebesar -85,09%, kemudian mengalami penurunan sebesar -56,44 pada TA 2015 dan kembali mengalami penurunan pada TA 2016 yaitu menjadi sebesar -8,74%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat jika dari tahun ke tahun khususnya Tahun 2016 bahwa rasio kemandirian Provinsi Kalimantan Utara semakin tinggi, makin berbanding terbalik dengan rasio tingkat ketergantungan yang semakin kecil.

Tabel 1. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	104.848.110.184	86.580.488.929	53.913.245.323
Dana Bagi Hasil; Non Pajak	1.094.988.346.662	112.663.608.150	115.570.655.404
Dana Alokasi Umum	20.567.986.000	651.247.428.000	1.032.459.159.000
Dana Alokasi Khusus	8.221.270.000	59.947.820.000	249.898.274.058
Transfer Pemerintah Lainnya	72.893.280.000	92.331.430.000	7.109.590.000
Total	Rp1.301.518.992.846	Rp1.002.770.775.079	Rp1.458.950.923.785

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Tana Tidung TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dana transfer pusat yang diterima Provinsi Kalimantan Utara dari TA 2014-2016 adalah berfluktuasi. Total realisasi dana transfer pusat untuk Provinsi Kalimantan Utara pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.301.518.992.846, kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan menjadi Rp1.002.770.775.079. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya DBH Bukan Pajak pada tahun tersebut yang cukup tinggi. Dan untuk TA 2016 total realisasi dana transfer pusat ke daerah mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar Rp1.458.950.923.785.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Provinsi Kalimantan Utara TA 2016 dalam Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat temuan terkait dengan Transfer Pusat ke Daerah yaitu permasalahan kekurangan volume dan kelebihan perhitungan pekerjaan pada Dinkes, DPKKP, DPU dan Dishubkominfo yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.081.258.427,27 serta terjadi keterlambatan pekerjaan pada Dishubkominfo yang belum dikenakan denda sebesar Rp68.435.837,31. Dan secara rinci permasalahan terkait dana transfer pusat yaitu yang bersumber dari DAK adalah permasalahan kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat tahap I sebesar Rp50.624.387,66 dan permasalahan kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung Bappeda tahap III sebesar Rp348.463.081,28. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan karena kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat tahap I sebesar Rp50.624.387,66 dan kelebihan pembayaran

pekerjaan karena kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Tahap III sebesar Rp348.463.081,28.

Kabupaten Bulungan

OPINI

WDP
2014

WDP
2015

WDP
2016

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(Dalam Miliar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Ketergantungan (%)
2014	7,97%	84,84%
2015	12,09%	77,54%
2016	8,63%	85,22%

Celah Ketergantungan



Temuan



Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan



Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Bulungan TA 2014-2016

A. Opini

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk TA 2014-2016 Kabupaten Bulungan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) secara 3 (tiga) tahun berturut-turut. BPK memiliki dasar-dasar dalam pemberian opini tersebut.

Dasar Opini WDP yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Bulungan TA 2014 adalah karena terdapatnya penyajian Aset tetap yang belum sepenuhnya dapat di yakini kewajarannya yang antara lain disebabkan oleh:

1. Pemerintah Kabupaten Bulungan belum dapat menjelaskan perbedaan selisih aset tetap antara SIMDA barang milik daerah dengan SIMDA Keuangan;
2. Terdapat aset tetap berupa tanah sebanyak 4 (empat) persil, peralatan dan mesin sebanyak 75 unit serta gedung dan bangunan sebanyak 11 unit belum memiliki nilai;
3. Pemerintah Kabupaten Bulungan belum menyajikan aset tanah badan jalan dalam Neraca per 31 Desember 2014.

Selain itu dasar Opini WDP yang diberikan BPK atas LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 adalah karena:

1. Pemerintah Kabupaten Bulungan belum dapat menjelaskan perbedaan selisih aset tetap antara SIMDA Barang Milik Daerah dengan SIMDA Keuangan;
2. Aset tetap berupa tanah sebanyak 4 (empat) persil, peralatan dan mesin sebanyak 75 unit, serta gedung dan bangunan sebanyak 11 unit belum memiliki nilai;
3. Pemerintah Kabupaten Bulungan belum menyajikan aset tetap berupa Tanah Badan Jalan dalam Neraca per 31 Desember 2014.

Kemudian pada TA 2016 dasar opini WDP yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaan LKPD adalah karena:

1. Terdapat penyajian realisasi pendapatan retribusi-LRA, namun tidak termasuk penerimaan retribusi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah;
2. Penyajian aset tetap tanah, namun aset tetap tanah tersebut belum termasuk tanah gedung kantor pada 10 SKPD;
3. Terdapat selisih jumlah ruas jalan antara yang tertera dalam KIB dan Surat Keputusan Bupati;

4. Terdapat sisa uang persediaan TA 2016 pada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang tidak dipertanggungjawabkan dan tidak disetorkan ke Kas Daerah.

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Provinsi dan Bantuan Keuangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mengalami Fluktuasi dari TA 2014-2016.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi PAD TA 2014 adalah sebesar Rp126.038.940.770,95 kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp121.415.654.032,78 atau turun sebesar 3,67% dan pada Tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp101.738.903.187,80 atau turun 16,21%.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Berdasarkan LRA untuk realisasi DBH Pajak TA 2014 adalah sebesar Rp138.973.068.921,00. Kemudian pada TA 2015 realisasi DBH mengalami penurunan sebesar Rp22.053.786.871,00 atau naik 15,87% menjadi Rp116.919.282.050,00 dan pada TA 2016 mengalami penurunan kembali sebesar Rp7.236.438.976,00 atau 6,19% menjadi Rp109.682.843.074,00 dan untuk realisasi DBH Bukan Pajak Kabupaten Bulungan TA 2014 adalah sebesar Rp817.853.667.235,00 namun pada TA 2015 realisasi DBH Bukan Pajak Kabupaten Bulungan mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar Rp553.426.860.954,00 atau 67,67% menjadi Rp264.426.806.281,00 dan pada TA 2016 mengalami kenaikan kembali namun tidak terlalu tinggi sebesar Rp15.051.550.786,00 atau naik 5,69% menjadi Rp279.478.357.067,00.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan LRA untuk realisasi DAU TA 2014 adalah sebesar Rp332.429.548.000,00. Kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp27.294.936.000,00 atau turun 8,21% dari realisasi tahun sebelumnya menjadi Rp305.134.612.000,000 dan untuk realisasi TA 2016

mengalami kenaikan kembali sebesar Rp156.975.696.000,00 atau naik 51,44% menjadi Rp462.110.308.000,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan LRA untuk realisasi DAK TA 2014-2016 terus mengalami peningkatan yaitu pada TA 2014 realisasinya adalah sebesar Rp8.033.475.000,00 kemudian TA 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp11.561.585.000,00 atau naik 143,92% menjadi Rp19.595.060.000,00 dan pada TA 2016 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar Rp60.580.093.228,00 atau meningkat 309,16% dari realisasi tahun sebelumnya menjadi Rp80.175.153.228,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Berdasarkan LRA untuk realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2014 adalah sebesar Rp44.853.391.000,00 kemudian pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp27.631.234.457,00 atau naik 61,61% dari realisasi tahun sebelumnya menjadi Rp72.485.387.000,00 dan untuk realisasi TA 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp627.234.457,00 atau naik 0,87% menjadi sebesar Rp73.112.621.457,00.

Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan

Berdasarkan LRA untuk realisasi Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan TA 2014-2016 adalah fluktuatif. Dan untuk realisasi Bantuan Keuangan Kabupaten Bulungan hanya menerima Bantuan Keuangan pada TA 2015. Sehingga realisasi Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Bulungan pada TA 2014 adalah sebesar Rp87.596.768.575,00 kemudian pada TA 2015 realisasinya sebesar Rp104.152.115.638,38 dan realisasi pada TA 2016 adalah sebesar Rp39.766.925.456,80.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan LRA untuk realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2014 adalah sebesar Rp26.276.770.000,00 namun pada TA 2015 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Bulungan adalah nihil atau 0 dan pada TA 2016 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Bulungan adalah sebesar Rp32.666.141.920,00.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian dapat dilihat melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Pada TA 2014 Rasio Kemandirian Kabupaten Bulungan adalah sebesar 7,97% kemudian pada TA 2015 Rasio Kemandiriannya mengalami peningkatan menjadi sebesar 12,09% namun pada TA 2016 rasio kemandirian Kabupaten Bulungan mengalami penurunan kembali menjadi 8,63%.

Dana Transfer Pusat ke Daerah masih menjadi sumber penerimaan terbesar Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase tingkat ketergantungan keuangan yang didapatkan dari perhitungan perbandingan penerimaan dana Transfer Pusat ke Daerah. rasio ketergantungan Kabupaten Bulungan pada TA 2014 adalah sebesar 84,84%, kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan persentase ketergantungannya menjadi sebesar 77,54% dan pada TA 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 85,22%.

Kemudian dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dengan rasio ketergantungan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai negatif yang cukup lebar antara selisih rasio tersebut yaitu pada TA 2014 sebesar -76,87%, kemudian pada TA 2015 sebesar -65,44% dan pada TA 2016 sebesar -76,87.

Tabel 2. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	138.973.068.921,00	116.919.282.050,00	109.682.843.074,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	817.853.667.235,00	264.426.806.281,00	279.478.357.067,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	332.429.548.000,00	305.134.612.000,00	462.110.308.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	8.033.475.000,00	19.595.060.000,00	80.175.153.228,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	44.853.391.000,00	72.485.387.000,00	73.112.621.457,00
Total	1.342.143.150.156,00	706.075.760.331,00	1.004.559.282.826,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Bulungan TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel realisasi transfer pusat diatas dapat dilihat bahwa realisasi Dana Transfer Pusat Kabupaten Bulungan berfluktuasi. Total realisasi penerimaan Dana Transfer dari Pusat mengalami penurunan pada TA 2015 dari total penerimaan pada TA 2014 sebesar Rp1.342.143.150.156,00 mengalami penurunan sebesar 41,99% atau

Rp563.582.002.825,00 menjadi Rp706.075.760.331,00 hal tersebut terjadi karena penurunan pada hampir seluruh realisasi penerimaan dana transfer, terutama pada realisasi penerimaan DBH Bukan Pajak yang mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp553.426.860.954,00 atau 67,67%. Dan pada TA 2016 total penerimaan dana Transfer Pusat Kabupaten Bulungan kembali mengalami kenaikan sebesar Rp225.998.135.495,00 atau 29,03% yang dipengaruhi dari kenaikan realisasi DAU sebesar 51,44% dan kenaikan DAK sebesar 309,16%.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bulungan TA 2015 terdapat temuan dalam Sistem Pengendalian Intern terkait dengan Dana Transfer Pusat ke Daerah yaitu:

1. Permasalahan pencatatan aset tetap dalam KIB B, Dinas Pendidikan yang belum mencatat aset aset peralatan dan mesin yang berasal dari dana BOS Daerah dan BOS Provinsi. Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan aset tetap yang bersumber dari anggaran BOS Daerah, BOS Provinsi dan BOS Nasional TA 2015 belum dapat teridentifikasi dan belum tercatat dalam neraca Pemerintah Kabupaten Bulungan per 31 Desember 2015.
2. Permasalahan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang belum menganggarkan dan melaporkan penerimaan, pengeluaran dan aset tetap yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pusat lainnya yaitu rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS Nasional TA 2015 dalam formulir BOS-K8 belum lengkap, namun atas pembiayaan yang dikeluarkan tersebut, Dinas Pendidikan belum dapat mengelompokkan ke pos belanja dan belum dapat mengidentifikasi aset tetap yang dihasilkan dan diketahui terdapat bantuan pusat Rp4.461.909.000,00. Atas penerimaan bantuan pusat tersebut Dinas Pendidikan belum menganggarkan dan melaporkan kepada BUD dan aset yang diperoleh dari bantuan tersebut yang telah dicatat hanya sebesar Rp1.370.950.000,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan, belanja, dan aset yang bersumber dari dana bantuan langsung ke sekolah tidak dapat dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan TA 2015.

Kemudian pada TA 2016 terdapat temuan dalam Sistem Pengendalian Intern terkait Transfer Pusat ke Daerah yaitu:

1. Permasalahan adanya temuan pengelolaan dana BOS yang belum memadai seperti permasalahan kesalahan *Mapping* penganggaran pendapatan BOS Nasional dan P2D2, masih terdapatnya sekolah yang belum tertib melaporkan realisasi penggunaan Dana BOS, lalu terdapatnya lebih saji realisasi belanja modal BOS sebesar Rp1.630.417.125,00 dan sekolah yang tidak melaporkan saldo dana BOS per 31 Desember 2016 sebesar Rp814.494.193,29. Permasalahan tersebut mengakibatkan penganggaran dan penyajian pendapatan dana BOS dan P2D2 tidak sesuai ketentuan, lebih saji belanja modal dana BOS Nasional sebesar Rp1.630.417.125,00 atas kegiatan yang tidak menambah aset tetap, Lebih saji Belanja BOS daerah dan kurang saji kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan atas tidak dilaporkannya saldo dana BOS Daerah sebesar Rp814.494.193,29 dan potensi penyalahgunaan dana BOS Nasional yang belum dilaporkan realisasi penggunaannya dan saldo BOS Daerah yang tidak dilaporkan.
2. Permasalahan realisasi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp463.574.370,00 yang tidak sesuai peruntukannya yang berasal dari dana pendamping DAK reguler TA 2016 yaitu pekerjaan peningkatan jalan Padat Karya (PKT) di Tanjung Palas dan peningkatan ruas jalan Pejalin – Antutan sebesar Rp33.578.500,00, lalu pekerjaan pemeliharaan jalan di Kecamatan Tanjung Selor (Jalan Sabanar Baru II, Jalan Padat Karya I, Jalan Binjai, Jalan Langsung dan Jalan Mangga) sebesar Rp30.069.000,00, kemudian pekerjaan peningkatan ruas jalan Sekatak Buji - *Camp* Intraca di Sekatak sebesar Rp7.460.000,00 dan terakhir yaitu pekerjaan pengadaan instalasi air minum/air bersih sebesar Rp44.170.000,00 yang berasal dari dana pendamping DAK IPD TA 2016. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan tidak sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 54 ayat (1) dan (2). Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi penggunaan anggaran Belanja Modal tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp463.574.370,00.

Kabupaten Malinau

OPINI

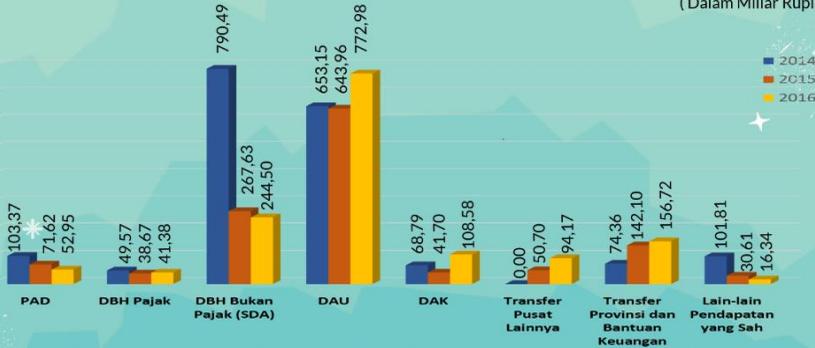
WTP
2014

WTP
2015

WTP
2016

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(Dalam Miliar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Ketergantungan (%)
2014	5,61%	84,82%
2015	5,57%	81,01%
2016	3,56%	84,81%

Celah Ketergantungan



Temuan



Sistem Pengendalian Intern

2014



2015



2016



Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

2014



2015



2016



Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Malinau TA 2014-2016

A. Opini

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk Tahun Anggaran (TA) 2014-2016 mengungkapkan hasil Opini yang baik dan konsisten. Kabupaten Malinau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara 3 (tiga) tahun berturut-turut. Hal tersebut menandakan bahwa Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Provinsi dan Bantuan Keuangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mengalami fluktuasi dari TA 2014-2016.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi PAD TA 2014 adalah sebesar Rp103.370.977.368,61, namun pada TA 2015 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp31.745.605.502,13 atau 30,71% menjadi Rp71.625.371.866,48, hal tersebut dikarenakan penurunan pada penerimaan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah. Kemudian pada TA 2016 kembali mengalami penurunan realisasi PAD yaitu sebesar Rp18.675.281.420,01 atau turun 26,07% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.52.950.090.446,47.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi DBH Pajak TA 2014 adalah sebesar Rp49.572.529.197,00 kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp10.896.660.769,00 atau minus 21,98% dari tahun sebelumnya, dan pada TA 2016 realisasi DBH Pajak mengalami kenaikan kembali sebesar Rp2.705.837.174,00 atau naik 7,00%. Dan untuk realisasi DBH Bukan Pajak/ DBH Sumber Daya

Alam (SDA) Kabupaten Malinau TA 2014 adalah sebesar Rp790.493.828.115,00, namun pada TA 2015 realisasi DBH SDA mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp522.857.128.368,00 atau 66,14% menjadi Rp267.636.699.747,00. Dan pada TA 2016 kembali mengalami penurunan sebesar Rp23.132.218.577,00 atau 8,64% menjadi Rp244.504.481.170,00.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi DAU TA 2014 adalah sebesar Rp653.156.829.000,00. Kemudian pada TA 2015 realisasi DAU Kabupaten Malinau turun sebesar Rp9.191.616.000,00 atau 1,41% menjadi Rp643.965.213.000,00 dan pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp129.015.270.000,00 atau naik 20,03% menjadi Rp772.980.483.000,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi DAK TA 2014 adalah sebesar Rp68.797.530.000,00 kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp27.088.270.000,00 atau 39,37% dan pada TA 2016 realisasi DAK Kabupaten Malinau mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp66.875.224.965,00 atau 160,34% lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp108.584.484.965,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2014 adalah 0, kemudian TA 2015 Kabupaten Malinau mendapatkan realisasi sebesar Rp50.705.054.000,00, dan pada TA 2016 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp43.465.667.000,00 atau naik 85,72% menjadi Rp108.584.484.965,00.

Transfer Provinsi dan Bantuan Keuangan

Berdasarkan LRA untuk realisasi Transfer Provinsi TA 2014 sebesar Rp74.361.981.975,00 untuk TA 2014 Kabupaten Malinau tidak terdapat realisasi Dana Bantuan Keuangan. Kemudian pada TA 2015 realisasi Transfer Provinsi adalah sebesar Rp33.486.153.274,43 dan Bantuan Keuangan Rp108.620.000.000,00 dan pada TA 2016 realisasi

Transfer Provinsi adalah sebesar Rp39.230.939.806,87 dan Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp117.490.000.000,00.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2014 adalah sebesar Rp101.815.430.335,00. Kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp71.198.958.537,00 atau 69,93% menjadi Rp30.616.471.798,00 dan pada TA 2016 mengalami penurunan kembali sebesar Rp14.271.371.798,00 atau 46,61% menjadi Rp16.345.100.000,00

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian dapat dilihat melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Pada TA 2014 Rasio Kemandirian Kabupaten Malinau adalah sebesar 5,61%, Kemudian mengalami penurunan pada TA 2015 menjadi 5,57% dan pada TA 2016 Rasio Kemandirian Kabupaten Malinau kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 3,56%.

Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Malinau sebagian besar masih bersumber dari Dana Transfer Pusat ke daerah yaitu Dana Perimbangan (DBH Pajak, DBH bukan Pajak, DAU, DAK) dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase tingkat ketergantungan keuangnya yang dihitung melalui perbandingan penerimaan dana Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan daerah. Rasio Ketergantungan Kabupaten Malinau pada TA 2014 adalah sebesar 84,82%, kemudian mengalami penurunan pada TA 2015 menjadi sebesar 81,01% dan pada TA 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 84,81%.

Kemudian dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dengan rasio ketergantungan keuangan Kota Tarakan yang ditunjukkan dengan nilai negatif yang cukup lebar antara selisih kedua rasio tersebut yaitu untuk TA 2014 adalah -79,21%, kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan menjadi -75,45 dan kembali mengalami kenaikan menjadi -81,25 pada TA 2016.

Tabel 3. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	49.572.529.197,00	38.675.868.428,00	41.381.705.602,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	790.493.828.115,00	267.636.699.747,00	244.504.481.170,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	653.156.829.000,00	643.965.213.000,00	772.980.483.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	68.797.530.000,00	41.709.260.000,00	108.584.484.965,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	50.705.054.000,00	94.170.721.000,00
Total	1.562.020.716.312,00	1.042.692.095.175,00	1.261.621.875.737,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Malinau TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel realisasi diatas dapat dilihat bahwa semua dana transfer pusat Kabupaten Malinau dari TA. 2014-2016 adalah berfluktuasi. Total realisasi penerimaan Dana Transfer Pusat TA 2014 adalah sebesar Rp1.562.020.716.312,00, kemudian mengalami penurunan pada TA 2015 menjadi Rp1.042.692.095.175,00 dan kembali mengalami kenaikan menjadi Rp1.261.875.737,00 pada TA 2016. Dari semua realisasi yang tersaji hanya realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari TA 2014 yang tidak menerima dana tersebut, lalu pada TA 2015 menerima Dana Transfer sebesar Rp.50.705.054.000,00 kemudian meningkat kembali pada TA 2016 menjadi sebesar Rp94.170.721.000,00.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Malinau TA 2014 terdapat temuan dalam Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Transfer Pusat ke Daerah yaitu permasalahan terjadinya kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan perhitungan biaya kontrak pada beberapa SKPD yang menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp709.201.303,90 menurut hasil pemeriksaan menunjukkan untuk pekerjaan yang menggunakan sumber dana dari Transfer Pusat yaitu pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Tanjung Keranjang yang berasal dari dana DAK Irigasi Tambahan yang mengalami kekurangan volume sebesar Rp53.896.478,48. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan karena kekurangan volume sebesar

Rp525.990.162,55 dan karena kelebihan perhitungan dalam RAB sebesar Rp183.211.141,35 atau seluruhnya sebesar Rp709.201.303,90.

Kemudian pada TA 2015 terdapat temuan Sistem Pengendalian Intern terkait Transfer Pusat ke Daerah yaitu permasalahan belum di anggarkannya pendapatan dan belanja dana BOS dalam APBD Kabupaten Malinau TA. 2015 dan adanya permasalahan pendapatan dan belanja BOS yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Malinau belum seluruhnya dilakukan pengesahan oleh BUD yaitu dari total pendapatan dana BOS Pusat yang diperuntukkan bagi 143 sekolah sebesar Rp15.203.750.000,00, sudah diterbitkan SP2D pengesahan sebesar Rp4.135.200.000,00 untuk 133 sekolah. Atas pendapatan dana BOS tersebut, total belanja yang sudah disahkan sebesar Rp3.848.700.000,00 untuk 133 sekolah. Dengan demikian pendapatan yang belum dilakukan pengesahan oleh BUD adalah sebesar Rp1.068.550.000,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan APBD Kabupaten Malinau belum dapat menggambarkan nilai pendapatan dan belanja yang direncanakan dari penerimaan dana BOS Pusat dan Hibah langsung berupa BOS Pusat dan dana Bansos Kemendikbud belum seluruhnya tercatat pada LRA Kabupaten Malinau.

Selain itu terdapat pula temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu permasalahan terjadinya kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Dinas Pekerjaan Umum yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp862.868.834,32 dan permasalahan yang terkait dana yang bersumber dari Transfer Pusat ke Daerah yaitu dana DAK adalah kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan Jaringan Irigasi Tanjung Keranjang sebesar Rp47.497.980,02 yang dilaksanakan oleh CV. Bina Usaha. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan karena kekurangan volume sebesar Rp47.497.980,02

Kabupaten Nunukan

OPINI

WDP
2014

WTP
2015

WTP
2016

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(Dalam Miliar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Ketergantungan (%)
2014	6,87%	86,13%
2015	10,41%	78,95%
2016	6,21%	81,07%

Celah Ketergantungan



Temuan



Sistem Pengendalian Intern

2014



2015



2016



Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan



Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Nunukan TA 2014-2016

A. Opini

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nunukan TA. 2014-2016 yang memuat hasil opini yaitu pada TA. 2014 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada TA. 2015 mengalami peningkatan dengan memperoleh hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini tersebut pada TA. 2016 dengan opini WTP.

Dasar Opini WDP yang diberikan oleh BPK atas LKPD Kabupaten Nunukan TA.2014 adalah karena adanya penyajian aset tetap namun terdapat nilai tanah yang dilaporkan oleh 23 satuan kerja. Pemerintah Kabupaten Nunukan belum menyajikan seluruh tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam laporan keuangan yang terdiri dari tanah untuk jalan pada Dinas Pekerjaan Umum yang digunakan untuk lumbung pangan yang dihibahkan oleh masyarakat kepada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah. Selain tanah untuk jalan dan tanah untuk lumbung pangan, tanah sarana kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dengan luas yang belum diketahui juga belum dicatat dalam laporan keuangan atau belum disajikannya seluruh aset tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam laporan keuangan.

Kemudian dasar opini WTP yang diberikan BPK atas LKPD Kabupaten Nunukan TA. 2015 adalah karena Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melakukan inventarisasi dan pendataan ulang serta pencatatan aset tanah yang sebelumnya belum disajikan serta telah melaksanakan koreksi-koreksi yang diperlukan sehingga penyajian laporan keuangan menjadi wajar.

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Provinsi dan Bantuan Keuangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mengalami fluktuasi dari TA 2014-2016.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi PAD Kabupaten Nunukan pada TA 2014 adalah sebesar Rp111.968.757.895,52. Kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp6.984.766.371,51 atau 6,24% menjadi Rp104.983.991.524,01. Dan pada TA 2016 realisasi PAD Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp71.767.977.320,12 atau turun sebesar Rp33.216.014.203,89 atau 31,64%.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Berdasarkan LRA untuk realisasi DBH Pajak Kabupaten Nunukan TA 2014 adalah sebesar Rp97.514.019.026,00. Kemudian pada TA 2015 realisasi DBH Pajak mengalami penurunan sebesar Rp20.022.745.376,00 atau 20,53% dari TA sebelumnya menjadi Rp77.491.273.650,00. Dan pada TA 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp13.072.707.680,00 atau naik 14,43% menjadi Rp90.563.981.330,00. Selain itu untuk realisasi DBH Bukan Pajak/DBH SDA Kabupaten Nunukan pada TA 2014 adalah sebesar Rp870.928.628.569,00, kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp541.686.745.035,00 atau minus 62,20% dari TA sebelumnya menjadi sebesar Rp329.241.883.534,00, kemudian pada TA 2016 realisasi DBH SDA Kabupaten Nunukan kembali mengalami penurunan sebesar Rp37.239.933.680,00 atau 12,75% menjadi Rp292.001.949.854,00.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan LRA untuk realisasi DAU Kabupaten Nunukan TA 2014 adalah sebesar Rp311.776.974.000,00, namun pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp29.339.312.000,00 atau 9,41% menjadi Rp282.437.662.000,00. Kemudian pada TA 2016 realisasi DAU Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan kembali sebesar Rp117.822.881.000,00 atau naik 41,72% dari TA sebelumnya menjadi sebesar Rp400.260.543.000,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan LRA untuk realisasi DAK Kabupaten Nunukan TA 2014 adalah sebesar Rp91.938.820.000,00, namun pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp16.047.796.000,00 atau 17,45%

menjadi Rp75.891.024.000,00. Kemudian pada TA 2016 realisasi DAK Kabupaten Nunukan kembali mengalami kenaikan sebesar Rp78.253.241.063,00 atau naik 103,11% dari TA sebelumnya menjadi sebesar Rp154.144.265.063,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Berdasarkan LRA untuk realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Kabupaten Nunukan TA 2014 adalah sebesar Rp31.685.203.000,00 kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp871.112.000,00 atau 2,75% menjadi sebesar Rp30.814.091.000,00. Namun pada TA 2016 untuk realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Kabupaten Nunukan adalah nihil atau tidak terdapat realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya di Kabupaten Nunukan pada TA 2016.

Transfer Provinsi dan Bantuan Keuangan

Berdasarkan LRA untuk realisasi Transfer Provinsi Kabupaten Nunukan TA 2014 adalah sebesar Rp70.237.032.475,00 dan tidak terdapat realisasi Bantuan Keuangan pada TA 2014. Kemudian pada TA 2015 realisasi Transfer Provinsi Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp42.511.178.942,19 dan Bantuan Keuangan Rp63.781.500.000,00. Dan pada TA 2016 untuk realisasi Transfer Provinsi Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp43.619.049.785,04 dan Bantuan Keuangan Rp70.481.500.000,00.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan LRA untuk realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Nunukan pada TA 2014 adalah sebesar Rp43.947.973.100,00, namun mengalami penurunan yang cukup tinggi pada TA 2015 sebesar Rp43.068.705.835,00 atau 98,00% menjadi Rp879.267.265,00 dan pada TA 2016 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Nunukan kembali meningkat cukup tinggi dari TA sebelumnya yaitu sebesar Rp31.987.653.968,43 atau naik 3637,99% menjadi Rp32.866.921.233,43.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian dapat dilihat melalui perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada TA 2014 Kabupaten Nunukan memiliki rasio kemandirian sebesar 6,87%, kemudian meningkat pada

TA 2015 sebesar 10,41% dan menurun kembali pada TA. 2016 menjadi sebesar 6,21%.

Dana Transfer Pusat ke Daerah masih menjadi sumber penerimaan terbesar Pemerintah Kabupaten Nunukan. Hal tersebut membuat persentase rasio ketergantungan keuangannya terhadap TKD yang masih cukup tinggi. Perhitungan persentase tingkat ketergantungan tersebut didapatkan dari perbandingan penerimaan Dana Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan daerah. Untuk nilai presentase rasio ketergantungan Kabupaten Nunukan pada TA 2014 adalah sebesar 86,13% kemudian mengalami penurunan pada TA 2015 menjadi sebesar 78,95% dan meningkat kembali pada TA 2016 menjadi sebesar 81,07%.

Kemudian dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dengan rasio ketergantungan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai negatif yang cukup lebar antara selisih kedua rasio tersebut yaitu untuk TA 2014 adalah sebesar -79,26%, kemudian menurun menjadi sebesar -68,54 pada TA 2015 dan mengalami peningkatan pada TA 2016 menjadi sebesar -74,86%.

Tabel 4. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	97.514.019.026,00	77.491.273.650,00	90.563.981.330,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	870.928.628.569,00	329.241.883.534,00	292.001.949.854,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	311.776.974.000,00	282.437.662.000,00	400.260.543.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	91.938.820.000,00	75.891.024.000,00	154.144.265.063,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	31.685.203.000,00	30.814.091.000,00	0,00
Total	1.403.843.644.595,00	795.875.934.184,00	936.970.739.247,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Nunukan TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel realisasi diatas dapat dilihat bahwa realisasi dana Transfer Pusat ke Daerah pada TA. 2014-2016 itu berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa penerimaan transfer pusat mengalami penurunan pada TA. 2015 sebesar Rp607.967.710.411,00 atau 43,31%. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan penerimaan DBH Bukan Pajak yang cukup tinggi yaitu mencapai 62,20% penurunannya pada TA 2015 dan semua jenis Dana Perimbangan lainnya dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang juga mengalami penurunan. Dan pada TA 2016 total realisasi

Transfer Pusat ke Daerah kembali mengalami kenaikan sebesar Rp141.094.805.063,00. Hal tersebut dipengaruhi oleh naiknya realisasi DBH Pajak, DAU dan DAK Kabupaten Nunukan pada TA 2016.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Nunukan TA 2015 dalam Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan terkait dengan Transfer Pusat ke Daerah yaitu permasalahan pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah langsung ke Sekolah yang tidak memadai. Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan belum menyajikan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu masih terdapat saldo sisa dana yang belum digunakan pada rekening sekolah maupun kas tunai di bendahara Dana BOS di sekolah dan realisasi penggunaannya tidak dibuat laporan rekapitulasi klasifikasi jenis belanja sehingga tidak dapat diidentifikasi realisasi per jenis belanja sesuai dengan jenis belanja pada laporan keuangan daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan, belanja, dan aset yang bersumber dari dana hibah langsung ke sekolah belum dapat dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan TA 2015.

Kemudian pada TA 2016 terdapat temuan dalam Sistem Pengendalian Intern terkait Transfer Pusat ke Daerah yaitu belum tertibnya pengelolaan kas tunai pada bendahara dan pertanggungjawaban Dana BOS Pusat belum tertib menurut hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban ditemukan delapan sekolah yang terdiri dari empat SD Negeri, satu SMP Negeri dan tiga SMA/SMK Negeri yang memiliki kas lebih dari 10.000.000,00 dan diketahui terdapat 148 sekolah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Pusat Triwulan IV kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Permasalahan tersebut mengakibatkan Tim Manajemen BOS Provinsi tidak segera menerima informasi terkait penerimaan dan penggunaan dana BOS Pusat di Kabupaten Nunukan dan saldo kas lebih dari 10 juta berpotensi disalahgunakan.

Selain itu terdapat temuan dalam Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dana Transfer Pusat ke Daerah yaitu:

1. Permasalahan kurangnya volume pekerjaan penambahan ruangan Puskesmas Sedadap pada Dinas Kesehatan sesuai surat perjanjian

adalah sebesar Rp1.600.000.000,00 namun diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp111.549.949,55.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran satu paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp111.549.949,55

2. Permasalahan kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebesar Rp60.990.100,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan atas pembayaran TPG sebesar Rp60.990.100,00.

Kabupaten Tana Tidung

OPINI

WDP
2014

WDP
2015

WDP
2016

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(Dalam Miliar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Ketergantungan (%)
2014	4,17%	88,86%
2015	6,89%	83,53%
2016	2,82%	93,69%

Celah Ketergantungan



Temuan



Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan



Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Tana Tidung TA 2014-2016

A. Opini

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung pada TA 2014-2016 mengungkapkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut. BPK memiliki dasar dalam penentuan opini tersebut yaitu pada TA 2014 dasar opini WDP yang diberikan BPK atas LKPD Kabupaten Tana Tidung adalah karena terdapatnya penyajian Aset tetap yang belum akurat, hal tersebut dikarenakan:

1. Beberapa Aset tetap berupa tana meskipun telah tercatat, tetapi belum memiliki nilai, belum diketahui luasannya dan belum memiliki dokumen kepemilikan;
2. Beberapa Aset tetap berupa tanah badan jalan dan tanah yang berasal dari hibah belum tercatat;
3. Aset tetap berupa peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sehingga berpotensi terhadap penyalahgunaan /kehilangan;
4. Penyajian Aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan belum akurat.

Selanjutnya dasar opini WDP yang diberikan BPK atas LKPD Kabupaten Tana Tidung TA. 2015 adalah karena:

1. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung belum dapat menyajikan seluruh aset tetap berupa tanah secara akurat;
2. Dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak mengatribusikan setiap tambahan biaya untuk peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan ke dalam nilai aset tetap induknya, akan tetapi dicatat secara terpisah yang mengesankan terjadinya penambahan aset baru;
3. Terdapat uang persediaan yang dengan sengaja tidak dipertanggungjawabkan dan tidak disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang terdapat dalam akun aset lain-lain sebesar Rp246.196.000,00;
4. Terdapat pengeluaran sebesar Rp126.978.250,00 diduga telah disalahgunakan untuk tujuan yang bukan peruntukannya. Hal ini mengakibatkan realisasi belanja tidak terduga TA 2015 lebih disajikan.

Kemudian pada TA 2016 dasar opini WDP yang diberikan BPK atas LKPD Kabupaten Tana Tidung adalah karena:

1. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyajikan aset tetap peralatan dan mesin dan didalamnya termasuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya.
2. Terdapat selisih jumlah ruas jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan KIB D terdapat selisih jumlah ruas jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan yang berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung.
3. Dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak mengatribusikan setiap tambahan biaya untuk peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan ke dalam nilai aset tetap induknya, akan tetapi dicatat secara terpisah yang mengesankan terjadinya penambahan aset baru.
4. Terdapat uang persediaan yang dengan sengaja tidak dipertanggungjawabkan dan tidak disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang terdapat dalam akun Aset lain-lain.
5. Terdapat beban persediaan alat tulis, kemudian beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan beban persediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas yang tidak didukung dengan catatan pemakaian dan bukti pemakaian persediaan yang cukup.

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Provinsi dan Bantuan Keuangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mengalami fluktuasi dari TA 2014-2016.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan LRA untuk realisasi PAD pada TA 2014 adalah sebesar Rp45.788.366.559,25 kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp11.413.504.404,69 atau 24,93% menjadi Rp34.374.862.154,56 dan pada TA 2016 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar Rp13.384.653.452,95 atau 38,94% menjadi

Rp20.990.208.701,61. Penurunan PAD tersebut dipengaruhi dari penurunan Retribusi Daerah pada TA 2016 yaitu sebesar 86,37% dan selain itu juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan sebesar 60,13%.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Realisasi DBH Pajak pada TA 2014 adalah sebesar Rp25.984.255.328,00, namun pada TA 2015 realisasi DBH Pajak mengalami penurunan sebesar Rp9.677.875.428,00 atau 37,25% menjadi Rp16.306.379.900,00 dan pada TA 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp15.410.855.862,00 atau 94,51% lebih besar dibandingkan dengan TA sebelumnya menjadi Rp31.717.235.762,00. Selain itu untuk realisasi DBH Bukan Pajak/DBH SDA Kabupaten Tana Tidung TA 2014 adalah sebesar Rp734.185.147.015,00, namun pada TA 2015 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp515.919.658.261,00 atau 70,27% menjadi Rp218.265.488.754,00 dan pada TA 2016 kembali mengalami penurunan sebesar Rp10.283.049.194,00 atau 4,71% menjadi Rp207.982.439.560,00.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan LRA untuk realisasi DAU pada TA 2014 adalah sebesar Rp204.415.427.000,00. Namun pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp32.818.815.000,00 atau 16,05% menjadi Rp171.596.612.000,00 dan pada TA 2016 realisasi DAU Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp169.844.659.000,00 atau naik 98,98% lebih besar dibandingkan dengan realisasi TA sebelumnya menjadi Rp341.441.271.000,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan LRA pada TA 2014 tidak terdapat realisasi DAK untuk. Kemudian pada TA 2015 realisasi DAK Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar Rp8.094.928.000,00 dan pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp82.345.025.129,00 atau meningkat 1.017,24% dibandingkan dengan TA sebelumnya menjadi Rp90.439.953.129,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Berdasarkan LRA untuk realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2014 adalah sebesar Rp10.405.943.000,00, namun pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp7.693.205.200,00 atau 73,93% menjadi Rp2.712.737.800,00 dan pada TA 2016 kembali meningkat sebesar Rp24.217.422.200,00 atau 892,73% lebih besar dibandingkan dengan TA sebelumnya menjadi Rp26.930.160.000,00.

Transfer Provinsi dan Bantuan Keuangan

Berdasarkan LRA untuk realisasi Transfer Provinsi pada TA 2014 adalah sebesar Rp73.934.007.625,00 namun untuk TA 2014 Kabupaten Tana Tidung tidak terdapat realisasi Dana Bantuan Keuangan. Kemudian pada TA 2015 realisasi Transfer Provinsi adalah sebesar Rp22.608.431.705,33 dan Bantuan Keuangan Rp6.231.500.000,00. Dan pada TA 2016 realisasi Transfer Provinsi sebesar Rp15.061.682.166,62 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp10.589.000.000,00.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan LRA untuk realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.561.000.000,00, kemudian mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp16.465.708.424,36 atau 642,94% menjadi Rp19.026.708.424,36 dan pada TA 2016 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah justru mengalami penurunan sebesar Rp18.589.604.394,24 menjadi Rp437.104.030,12.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian dapat dilihat melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Pada TA 2014 Rasio kemandirian Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 4,71%, kemudian mengalami kenaikan pada TA 2015 menjadi sebesar 6,89% dan pada TA 2016 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,82%.

Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagian besar masih bersumber dari Dana Transfer Pusat ke daerah yaitu Dana Perimbangan (DBH Pajak, DBH bukan Pajak, DAU, DAK) dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase tingkat ketergantungan keuangannya yang dihitung melalui perbandingan penerimaan Dana Transfer Pusat ke Daerah (Dana

Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan daerah. Pada TA 2014 rasio ketergantungan Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 88,86%, lalu mengalami penurunan pada TA 2015 menjadi sebesar 83,53% dan pada TA 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 93,69%. Kemudian dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dengan rasio ketergantungan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai negatif yang cukup lebar antara selisih kedua rasio tersebut yaitu pada TA 2014 sebesar -84,68%, kemudian mengalami penurunan sebesar -76,64 pada TA 2015 dan kembali mengalami kenaikan pada TA 2016 menjadi sebesar -90,87%.

Tabel 5. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	25.984.255.328,00	16.306.379.900,00	31.717.235.762,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	734.185.147.015,00	218.265.488.754,00	207.982.439.560,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	204.415.427.000,00	171.596.612.000,00	341.441.271.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	8.094.928.000,00	90.439.953.129,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	10.405.943.000,00	2.712.737.800,00	26.930.160.000,00
Total	Rp974.990.772.343,00	Rp416.976.146.454,00	Rp698.511.059.451,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Tana Tidung TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel realisasi diatas dapat dilihat bahwa semua dana transfer pusat yang diterima Kabupaten Malinau dari TA 2014-2016 adalah berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa semua penerimaan Dana Transfer dari Pusat mengalami penurunan pada TA 2015, terutama untuk DBH Bukan Pajak yang mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp515.919.658.261,00 atau jika dipersentasekan mengalami penurunan sebesar 70,27%.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Nunukan TA 2016 terdapat temuan Sistem Pengendalian Intern terkait dengan Dana Transfer Pusat ke Daerah yaitu permasalahan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS dari Pemerintah untuk sekolah negeri di

Kabupaten Tana Tidung tidak dianggarkan dalam APBD. Diketahui Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD karena penggunaan dana BOS tersebut juga tidak dianggarkan dalam APBD dan penggunaan dana BOS tersebut jg tidak dianggarkan sebagai belanja daerah. Selama tahun 2016 sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Tana Tidung menerima dana BOS sebesar Rp4.322.600.000,00, sedangkan Dana Pencatatan gedung dan bangunan belum sesuai standar Akuntansi Pemerintahan yang dibelanjakan sebesar Rp4.212.872.369,25 dan pembukaan rekening-rekening di sekolah-sekolah tidak terinventarisir oleh BUD. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan dan belanja disajikan lebih rendah (*understated*) dari yang seharusnya dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah atas penerimaan dana BOS yang tidak dilaporkan ke BUD.

Selain itu terdapat juga temuan dalam Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu terjadinya Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tideng Pale-Kapuak Rian Lanjutan yang bersumber dari DAK. Diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan perkerasan berbutir lapis pondasi agregat kelas b sebesar Rp365.608.654,46. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp365.608.654,46.

Kota Tarakan

OPINI

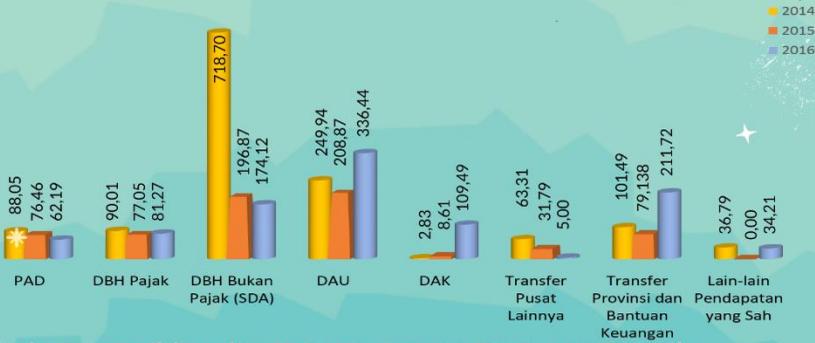
WTP-DPP
2014

WDP
2015

WDP
2016

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(Dalam Miliar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Ketergantungan (%)
2014	7,83%	83,25%
2015	11,26%	77,08%
2016	6,13%	69,63%

Celah Ketergantungan



Temuan



Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan



Sumber: LHP atas LKPD Kota Tarakan TA 2014-2016

A. Opini

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan pada TA 2014-2016 mengungkapkan pada TA 2014 Kota Tarakan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), namun mengalami penurunan dalam perolehan opininya pada TA 2015-2016 yaitu menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK memiliki dasar dalam penentuan Opini tersebut yaitu pada TA 2014 dasar opini WTP-DPP yang diberikan BPK atas LKPD Kota Tarakan TA 2014 adalah karena BPK tidak memeriksa laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alam Kota Tarakan yang merupakan perusahaan daerah yang seluruh ekuitasnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan. Laporan Keuangan PDAM Kota Tarakan menyajikan total aset, total pendapatan, dan total biaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP AF.Rachman & Soetjipto WS dengan opini Wajar Dengan Pengecualian pada kewajiban imbalan kerja dan pajak yang laporannya telah diserahkan kepada BPK. Terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Tarakan, opini BPK hanya didasarkan atas laporan hasil pemeriksa lain tersebut.

Selain itu Dasar opini WDP yang diberikan BPK atas LKPD Kota Tarakan pada TA 2015 yaitu karena:

1. Pemerintah Kota Tarakan menyajikan nilai tanah, namun Pemerintah Kota Tarakan belum menyajikan seluruh tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam laporan keuangan. Tanah tersebut untuk bangunan jalan sebanyak 108 ruas, Selain itu, tanah disajikan terpisah-pisah antara nilai tanah, nilai ganti rugi bangunan dan tanam tumbuh, pembayaran tahapan selanjutnya, serta nilai appraisal sehingga jumlah persil tanah lebih banyak dari jumlah persil senyatanya.
2. Pemerintah Kota Tarakan menyajikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Dari nilai tersebut, diantaranya beban penyusutan dan akumulasi penyusutan merupakan beban dan akumulasi penyusutan untuk 984 ruas jalan kota, yang berdasarkan Keputusan Walikota sebanyak 168 ruas. Dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap, Pemerintah Kota Tarakan tidak mengatribusikan setiap tambahan biaya berupa biaya peningkatan

dan/atau biaya pemeliharaan ke dalam nilai aset tetap induknya, akan tetapi dicatat secara terpisah yang mengesankan penambahan ruas jalan baru. Dengan demikian jika perhitungan nilai beban dan akumulasi penyusutan dilakukan terhadap aset tetap jalan yang telah teratribusi akan berbeda signifikan dengan nilai beban dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kemudian pada TA 2016 dasar opini WDP yang diberikan BPK atas LKPD Kota Tarakan adalah karena:

1. Pemerintah Kota Tarakan menyajikan nilai Tanah per 31 Desember 2016, namun nilai tersebut belum termasuk Tanah minimal yang berdasarkan rekapitulasi pengadaan tanah sejak tahun 2000 sampai dengan 2016;
2. Pemerintah Kota Tarakan menyajikan nilai Gedung dan Bangunan. Namun Nilai tersebut belum termasuk 174 Kios pada lahan Pemerintah Kota Tarakan seluas 6.752m² di wilayah Taman Hiburan Masyarakat (THM);
3. Pemerintah Kota Tarakan menyajikan Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut belum termasuk Jalan sebanyak 92 ruas yang belum diidentifikasi dari 168 ruas jalan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;
4. Pemerintah Kota Tarakan menyajikan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan. Pemerintah Kota Tarakan belum mengatribusikan setiap tambahan biaya berupa biaya peningkatan dan/atau biaya pemeliharaan ke dalam nilai aset tetap induk Gedung dan Bangunan, akan tetapi dicatat secara terpisah yang mengesankan penambahan gedung atau bangunan baru.

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Provinsi dan Bantuan Keuangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mengalami fluktuasi dari TA 2014-2016.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2014 adalah sebesar Rp88.059.263.275,24.

Kemudian mengalami penurunan pada TA 2015 sebesar Rp11.596.753.188,12 atau 13,17% menjadi Rp76.462.510.136,88 dan mengalami penurunan kembali pada TA 2016 sebesar Rp14.263.997.858,32 atau 18,65% hal tersebut disebabkan penurunan pada realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 31,09% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 58,00% pada TA 2016.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan realisasi DBH Pajak TA 2014 adalah sebesar Rp90.012.937.119,00, namun pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp12.961.518.419,00 atau 14,40% menjadi Rp77.051.418.700,00 dan pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,48% atau Rp4.225.269.044,00 menjadi Rp81.276.687.744,00. Berdasarkan LRA menunjukkan realisasi DBH Bukan Pajak Kota Tarakan pada TA 2014 adalah sebesar Rp718.709.201.849,00. Kemudian TA 2015 mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar Rp.521.829.961.754,00 atau 72,61% menjadi Rp196.879.240.095,00 dan pada TA 2016 juga mengalami penurunan sebesar Rp22.753.842.874,00 menjadi Rp174.125.397.221,00

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan LRA menunjukkan realisasi DAU pada TA 2014 adalah sebesar Rp208.879.172.000,00 pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp41.070.504.000,00 atau 16,43% menjadi Rp249.949.676.000,00 dan pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 61,07% atau naik Rp127.567.857.000,00 menjadi Rp336.447.029.000,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan LRA menunjukkan realisasi DAK pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.839.883.000,00. Kemudian untuk TA 2015 mengalami peningkatan 203,34% atau sebesar Rp5.774.676.000,00 menjadi Rp8.614.559.000,00 dan pada TA 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 1.171,08% atau naik Rp100.883.335.360,00 menjadi Rp.109.497.894.360,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Berdasarkan LRA menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2014 adalah sebesar Rp63.310.465.000,00. Kemudian pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp31.513.299,00 atau 49,78% menjadi Rp31.797.166.000,00 dan pada TA 2016 mengalami penurunan kembali sebesar Rp26.797.166.000,00 atau 84,28% menjadi Rp.5.000.0000.000,00.

Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan

Berdasarkan LRA menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan pada TA 2014 adalah sebesar Rp101.497.818.750,00 Kemudian mengalami penurunan pada TA 2015 sebesar Rp22.359.672.920,91 atau 22,03% menjadi Rp79.138.145.829,09 dan pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp132.583.796.376,31 atau 167,53% menjadi Rp211.721.942.205,40.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan LRA menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2014 adalah sebesar Rp36.791.842.201,00, namun pada TA 2015 realisasi Lain-lain Pendapatan Kota Tarakan adalah nihil atau 0 , kemudian realisasi pada TA 2016 adalah sebesar Rp34.217.327.744,00

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian dapat dilihat melalui perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada TA 2014 Rasio Kemandirian Kota Tarakan adalah sebesar 7,83% lalu mengalami peningkatan pada TA 2015 menjadi 11,26% dan pada TA 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 6,13%.

Sumber penerimaan terbesar Kota Tarakan masih bersumber dari Dana Transfer Pusat ke Daerah yaitu Dana Perimbangan (DBH Pajak, DBH bukan Pajak, DAU, DAK) dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase tingkat ketergantungan keuangnya yang dihitung melalui perbandingan penerimaan dana Transfer Pusat Ke Daerah. Pada TA 2014 Rasio Ketergantungan Kota Tarakan adalah sebesar 83,25% lalu mengalami penurunan pada TA 2015 menjadi sebesar 77,08% dan pada TA 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 69,63%. Selain itu hal

tersebut dapat dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dengan rasio ketergantungan keuangan Kota Tarakan yang ditunjukkan dengan nilai negatif yang cukup lebar antara selisih kedua rasio tersebut yaitu pada TA 2014 sebesar -75,42%, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar -65,81% dan pada TA 2015 dan kembali mengalami penurunan pada TA 2016 menjadi sebesar -63,50%.

Tabel 6. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	90.012.937.119,00	77.051.418.700,00	81.276.687.744,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	718.709.201.849,00	196.879.240.095,00	174.125.397.221,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	249.949.676.000,00	208.879.172.000,00	336.447.029.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.839.883.000,00	8.614.559.000,00	109.497.894.360,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	63.310.465.000,00	31.797.166.000,00	5.000.000.000,00
Total	Rp1.124.822.162.968,00	Rp523.221.555.795,00	Rp706.347.008.325,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kota Tarakan TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel realisasi transfer pusat diatas dapat dilihat bahwa realisasi Dana Transfer Pusat Kota Tarakan berfluktuasi. Total realisasi penerimaan Dana Transfer dari Pusat mengalami Penurunan yang cukup tinggi pada TA 2015 dari total penerimaan pada TA 2014 sebesar Rp1.124.822.162.968,00 mengalami penurunan sebesar 53,48% atau Rp523.221.555.795,00. Hal tersebut terjadi karena terjadinya penurunan pada hampir semua realisasi penerimaan dana transfer terutama pada realisasi DBH Bukan Pajak yang mengalami penurunan sebesar 72,61%. Namun pada TA 2016 total realisasi Transfer Pusat ke Daerah mengalami kenaikan kembali sebesar 35,00% yang di pengaruhi oleh naiknya realisasi DAK sebesar 1.171,08% dibandingkan dengan TA 2015.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kota Tarakan TA 2015 terdapat temuan dalam Sistem Pengendalian Intern terkait dengan Dana Transfer Pusat ke Daerah yaitu permasalahan Pemerintah Kota Tarakan

yang belum menganggarkan dan melaporkan seluruh penerimaan yang berasal dari dana BOS Nasional yang di terima SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Tarakan sebesar Rp32.696.947.006,00 dan Bantuan ke Sekolah sebesar Rp5.605.878.000,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan anggaran dan realisasi pendapatan hibah dari dana BOS dan *blockgrant* masing-masing sebesar Rp32.696.947.006,00 dan Rp5.605.878.000,00 serta anggaran dan realisasi belanja barang jasa dan belanja modal tidak disajikan di LRA dan membuka peluang penyalahgunaan atau duplikasi anggaran serta pengadaan aset tetap tidak tercatat sebagai aset daerah.

Kemudian pada TA 2016 dalam Sistem Pengendalian Intern terkait Transfer Pusat ke Daerah yaitu permasalahan pengelolaan biaya operasional untuk sekolah tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui besarnya BOSNAS yang diterima sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan selama TA 2016 adalah sebesar Rp34.373.607.000,00 dengan permasalahan terdapat salah penganggaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk belanja modal sebesar Rp4.502.060.890,00 dan belanja pegawai 11.086.721.481,00 selain itu permasalahan pencatatan penggunaan biaya operasional untuk sekolah pada LO tidak sesuai dengan klasifikasi pembebanannya sebesar Rp49.412.548.828,64 dan permasalahan terdapat sisa dana BOSDA maupun BOP yang mengendap sebesar Rp959.932.691,99 masih berada dalam penguasaan sekolah dan tidak dilaporkan sebagai kas di Bendahara Pengeluaran. Permasalahan tersebut mengakibatkan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp959.932.691,99 tidak dilaporkan dan belanja yang diakui di LRA lebih saji minimal senilai Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak dilaporkan. Lebih saji atas beban jasa, dan salah penganggaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp11.086.721.481,00 dan belanja modal sebesar Rp4.502.060.890,00 sehingga nilai belanja pegawai dan belanja modal tidak menunjukkan yang sebenarnya.